

**THE ASEAN WAY AND REGIONAL COMMUNITY 2005:
PARADIGM COMPARISON ANALYSIS
THE ASEAN WAY DAN KOMUNITAS KAWASAN 2015:
ANALISIS PERBANDINGAN PARADIGMA**

Poltak Partogi Nainggolan¹

Naskah diterima tanggal 2 Desember 2012,
disetujui tanggal 5 Februari 2013

Abstract

The prospect of the ASEAN Community, whose establishment has been accelerated from 2010 to 2015, has been more often questioned due to its lack of progress until recently. It is necessary, therefore, to analyse the progress from various sectors, such as politics, security, economy, social, and culture, by applying different perspectives, namely, constructivism, which seems not only pessimistic but also empirical. This paper explains the development of ASEAN since its formation until it sets and realizes its target to form a regional community. An important question raised in this paper is that whether ASEAN still looks as talk shops or it has been transforming itself towards a regional community, which can accomplish its mission within less than three years. ASEAN's capability to respond and find solutions to the problems confronted by its member countries has been used as a parameter to evaluate 'the ASEAN Way' and the progress that has been achieved by the regional organization in its roadmap towards a regional community.

Keywords: ASEAN, ASEAN Community 2015, regional community, the ASEAN Way

¹ Penulis adalah Peneliti Utama IV/e untuk Masalah-masalah Hubungan Internasional di Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI; dapat dihubungi di pptogin@yahoo.com

Abstrak

Masa depan perwujudan Komunitas ASEAN, yang dipercepat dari semula tahun 2020 menjadi tahun 2015, semakin dipertanyakan, karena minimnya kemajuan yang diperoleh ASEAN hingga dewasa ini. Kemajuan yang telah dicapai ASEAN di berbagai sektor, seperti politik, keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya perlu ditelaah dari perspektif yang berbeda, terutama konstruktifis, yang tidak hanya tampak pesimis, namun juga empiris. Tulisan ini menjelaskan perkembangan ASEAN sejak berdirinya hingga menargetkan diri menjadi sebuah komunitas di kawasan. Pertanyaannya adalah apakah ASEAN masih seperti sebuah organisasi regional yang menyerupai *talk shops*, ataukah sudah mengarah pada sebuah komunitas kawasan, yang akan tuntas perwujudannya hanya dalam waktu 3 tahun lagi? Kemampuan ASEAN dalam menyikapi dan mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi negara anggotanya dijadikan parameter untuk mengukur *'the ASEAN Way'*, dan sudah sejauh mana capaian kemajuan ASEAN dalam *roadmap*-nya menuju sebuah komunitas kawasan.

Kata Kunci: ASEAN, Komunitas ASEAN 2015, Komunitas Kawasan, *The ASEAN Way*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kebimbangan penulis terhadap dapat terwujudnya *ASEAN Community* pada tahun 2015, yang hanya tinggal beberapa tahun lagi, mendorong penulis untuk melakukan kajian ini. Pertanyaan tentang apakah *ASEAN Community* dapat terwujud tahun 2015 menjadi semakin relevan dibahas, karena terdapat dua pandangan yang berlawanan antara kalangan politik (pemimpin) ASEAN dengan kalangan akademik, terutama ilmuwan yang berasal dari luar kawasan, yaitu antara yang begitu optimis dengan pesimis. Dengan belajar dari studi dan pemikiran yang berkembang di Eropa, serta mengamati kegiatan ASEAN dalam interaksinya dengan pemerintah nasional dan parlemen negara anggota, penulis mendiskusikan perbedaan pandangan yang muncul, menganalisis, dan melihat relevansinya dengan perkembangan ASEAN

dewasa ini, serta menarik kesimpulan dari realitas yang berkembang di kawasan.

Target pembentukan ASEAN sebagai sebuah komunitas ekonomi, politik dan keamanan, dan kebudayaan semakin dekat, setelah dimajukan 5 tahun lebih awal, dari semula 2020 menjadi 2015.² Dihitung dari sekarang, 2012, waktu yang tersisa 3 tahun lagi. Kontradiktif dengan optimisme para pemimpin ASEAN atas kemajuan yang dicapai ASEAN saat ini dan kesanggupan ASEAN untuk memenuhi targetnya,³ mayoritas akademisi memiliki pandangan yang skeptis. Penulis pun dalam hal ini berpendapat, sangat sulit bagi ASEAN untuk mewujudkan targetnya sebagai sebuah komunitas yang terintegrasi di kawasan dalam 3 tahun ke depan.

Pandangan kontradiktif dan sekaligus skeptis ini bertitik-tolak dari argumen-argumen yang tidak hanya berkembang dalam beberapa tahun belakangan, namun sudah muncul sejak awal tahun 2000-an. Markus Hund, misalnya, pada tahun 2003, melalui analisis atas perluasan keanggotaan dan kegiatan ASEAN, telah menyimpulkan bahwa ASEAN + 3 sulit dikatakan sebagai kemajuan signifikan ASEAN, mengingat, baik ASEAN maupun Cina, serta Korea Selatan (Korsel) dan Jepang sebagai negara mitra dialognya, tidak menghendaki capaian yang lebih maju daripada yang telah diraih sebelumnya, dilihat dari ukuran kuantitatif maupun kualitatif.⁴

Analisis lain, Juergen Haacke, dalam tahun yang sama 2003, telah melihat kendala yang dimiliki ASEAN dalam mewujudkan komunitas keamanan di kawasan. Dari penilaian atas langkah-langkah diplomasi dan kultur keamanan yang telah diperlihatkan ASEAN sejak pembentukannya di tahun 1967, Haacke mendiskusikan secara mendalam bagaimana kolonialisme di masa lalu telah mempengaruhi pilihan para pendiri dan pemimpin baru negara anggota ASEAN untuk mempertahankan (gagasan) kedaulatan nasional dan membangun ketahanan nasional. Hal ini kemudian mempengaruhi mereka dalam memperjuangkan dan menjaga ketahanan kawasan dan prinsip non-intervensi, yang bertentangan dengan gagasan keamanan koperatif yang dilakukan di negara Eropa dan AS selama ini.⁵

² Lihat, "Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015," ASEAN Secretariat 2012, <http://www.asean.org/resources/archives/item>, diakses pada 4 Januari 2013.

³ Lihat, misalnya, Rodolfo C. Severino, *Southeast Asia In Search of An ASEAN Community*, Singapore: ISEAS, 2008; Rodolfo C. Severino, *ASEAN*, Singapore: ISEAS, 2006.

⁴ Markus Hund, "ASEAN Plus Three: Towards a New Age of Pan-Asian Regionalism? A Skeptic's Appraisal." *The Pacific Review*, Vol. 16, No. 3, 2003. September, 2003: 383-417.

⁵ Juergen Haacke, *ASEAN's Diplomatic and Security Culture: Origins, Development and Prospects 2003*. RoutledgeCurzon, London and New York, 2003.

⁶ Juergen Rueland, "ASEAN and the Asian Crisis: theoretical implications and practical consequences for SEA region-nalism," *The Pacific Review*, Vol. 13, No. 3, 2000: 421-451.

Lebih awal lagi, melalui analisisnya terhadap respons ASEAN atas krisis ekonomi yang menerpa kawasan pada tahun 1997, Juergen Rueland,⁶ berpendapat bahwa krisis ekonomi hebat di kawasan telah mengoyak-oyak identitas kolektif yang dimiliki negara anggotanya. Juga, secara realistis, respons negara anggota atas krisis begitu janggal, tidak seperti yang ditunjukkan negara anggota Uni Eropa (UE) dalam merespons krisis ekonomi dengan memperkuat kerja sama, namun cenderung mencari jalan keluar sendiri-sendiri. Ini sama kondisinya dengan UE dalam merespon krisis ekonomi di tahun 1970-an, yang menerapkan solusi sepihak (unilateralisme).

B. Perumusan Masalah

Secara teoritik, hancurnya identitas kolektif itu melemahkan relevansi pendekatan konstruktivist terhadap ASEAN. Sementara, keputusan beragam yang diambil negara anggota ASEAN memperkuat pendekatan realis, dan melemahkan pendekatan institusionalis, sehingga perkembangan ASEAN diibaratkan seperti turis yang tengah melakukan perjalanan institusionalis dengan membawa banyak bagasi yang sarat dengan nilai-nilai realis. Kondisi ekonomi negara anggota yang memperlihatkan kesalingketergantungan memberikan landasan yang lemah bagi interpretasi institusionalis ASEAN, sedangkan pembangunan ekonomi mereka masing-masing tampak sebagai sumber kekuatan dalam perspektif realis.

C. Tujuan

Tulisan ini bermaksud menilai kemampuan ASEAN untuk mewujudkan dirinya menjadi sebuah komunitas kawasan yang terintegrasi secara politik, ekonomi, dan sosial budaya, dari hanya sebuah organisasi perhimpunan negara di kawasan Asia Tenggara. Kajian dilakukan terhadap norma tradisional ASEAN dengan menggunakan perspektif Barat (Eropa), konstruktivis dan neo-konstruktivis, untuk memperluas wawasan, dari yang semula lebih bersandar pada pendekatan institusionalis. Setelah melakukan penilaian atas kemajuan empirik yang telah dicapai ASEAN sampai dewasa ini saat kajian dibuat, dilakukan penilaian apakah kita boleh optimis dengan realisasi Komunitas ASEAN 2015, ataukah cukup skeptis dengan capaian yang ada.

D. Kerangka Pemikiran

Memahami *the ASEAN Way*

Tentu saja, kajian di atas pertama-tama harus dimulai dengan mendiskusikan secara mendalam, apa yang selalu menjadi jalan keluar (solusi) negara-negara anggota ASEAN dalam menyelesaikan masalah bersama di

kawasan, atau yang dikenal sebagai "cara ASEAN" (*The ASEAN Way*). Selama ini kita ketahui, kerja sama ASEAN kebanyakan bersifat informal dan personal mengalami reduksi, dan mudah diabaikan oleh negara anggotanya. Keputusan mereka untuk tidak mematuhi atau keluar dari kesepakatan yang telah dicapai bersama tidak pernah atau akan mendapat sanksi ataupun bentuk-bentuk lain dari aksi pembalasan yang serius. Pengaturan kerja sama dibuat berdasarkan seperangkat nilai-nilai minimalis yang dapat dibagi, dengan penekanan inheren pada fleksibilitas dan pragmatisme, dan langka atas aturan-aturan yang mengikat. Larangan atau ketentuan mengenai pelanggaran atau ketidakpatuhan atas kesepakatan yang ada bersifat terlalu longgar. Mundur dari posisi yang telah disepakati bersama tidak distigmatisasi secara moral.

Cara atau Solusi ASEAN (*The ASEAN Way*) juga cenderung berupaya menyembunyikan masalah di balik penghalusan kata (eufemisme) dan tindakan-tindakan simbolik. *The ASEAN Way* dapat dikatakan memperlihatkan kondisi yang *fair* dan mekar saat ekonomi negara anggotanya dalam kondisi mengalami perkembangan yang menggembirakan. Tetapi, dalam situasi-situasi krisis, konflik-konflik kepentingan muncul lebih tajam, dan ASEAN resisten terhadap upaya untuk menyapu kotoran di balik karpet, atau selalu berupaya menyembunyikan konflik-konflik tersebut.

Keberagaman politik telah membatasi pilihan-pilihan bagi dapat dilangsungkannya pembaruan institusional, karena hal tersebut pada akhirnya memunculkan pilihan pentingnya upaya mempertahankan diri (*survival*) bagi elit yang berkuasa di beberapa negara anggota ASEAN. Sebagai konsekuensinya, muncul pertentangan antara rejim yang setuju atau tengah melakukan demokratisasi dengan rejim yang otoriter terhadap penentuan prinsip-prinsip kerja sama. Dengan demikian, norma-norma yang membentuk identitas kolektif ASEAN masih menghasilkan lapisan tipis institusionalisme ASEAN, yang dibalut sesungguhnya dengan perilaku realis. Sehingga, wajar, Rueland mengatakan bahwa institusionalisme di ASEAN lebih memperlihatkan panggilan jaman yang neoliberal daripada mewakili substansi yang sebenarnya. Institusionalisme seperti ini lah yang telah memungkinkan ASEAN untuk boleh berpartisipasi dalam berbagai macam permainan keseimbangan dalam sistem internasional tanpa harus mentransformasi nilai-nilai dasarnya. Namun, sebaliknya, ia telah menyulitkan ASEAN untuk melakukan integrasi yang mendalam. Karena itu, di awal abad 21, ASEAN akan tetap tampak dengan perilaku realisnya daripada institusionalisnya.

Dari kilas balik perjalanan ASEAN sejak berdirinya hingga dewasa ini, para analis menilai selalu terdapat jurang yang lebar antara tujuan-tujuan retorik yang diungkapkan para pemimpin ASEAN dengan kemajuan aktual

yang telah berhasil dicapai ASEAN.⁷ Sebagaimana dalam tahun-tahun sebelumnya, dewasa ini perkembangan ASEAN juga baru memperlihatkan perannya sebagai arena basa-basi (*talk shops*). ASEAN tidak lebih dari itu, walaupun mantan Sekjenya sendiri, Rodolfo. C. Severino, membelanya secara berulang, keadaan ini pun tetap berguna sebagai awal yang memungkinkan ASEAN membuat langkah yang lebih berarti di masa depan.⁸ Demikian pula, Sekjen ASEAN dewasa ini, ketika tulisan ini dibuat, Surin Pitsuwan, dalam menilai perkembangan ASEAN, tampak pula menjustifikasi bahwa ASEAN telah berada dalam *track* yang benar, dan ia tetap pesimis dengan keberhasilan realisasi Komunitas ASEAN pada 31 Desember 2015 yang akan datang.⁹

Dengan menggunakan sebuah perspektif institusionalisasi sosiologis, Jetschke, dari studinya tentang perkembangan ASEAN selama 4 dasawarsa, menyimpulkan bahwa ASEAN hanya mampu melakukan proses institusionalisasi atau pelembagaan secara tipis, atau di permukaan saja, dan gagal menghasilkan tujuan-tujuan kerja sama yang substansial. Dengan kata lain, ia menyampaikan, walaupun ada upaya pembaruan tertentu yang telah dilakukan ASEAN secara selektif, ia belum melakukan inovasi-inovasi kelembagaan utama apapun.¹⁰ Sedangkan dorongan-dorongan utama bagi kerja sama telah muncul dari luar kawasan Asia Tenggara, terutama Eropa. Dengan meniru proses integrasi Uni Eropa, negara anggota ASEAN telah menciptakan suatu organisasi isomorfis melalui sebuah proses peniruan dalam pembentukan jejaring *governance*-nya. Dalam perspektif ini, perkembangan kelembagaan ASEAN hanya merefleksikan tujuan untuk meraih legitimasi (masyarakat) internasional, dengan hanya sedikit tuntutan fungsional yang obyektif, yang berasal dari interaksi-interaksi spesifik dari negara anggotanya.

Senada dengan analisis di atas, namun sedikit berbeda, masih menggunakan perspektif institusionalisme sosiologis, khususnya neo-institusionalisme, Deepak Nair, mengatakan bahwa dalam memahami ASEAN, sebagaimana halnya terhadap institusi-institusi lainnya di Asia Timur, orang perlu mengetahui bahwa tujuan-tujuan yang eksplisit tampaknya tidak penting. Sebagai sebuah organisasi yang dilembagakan, ASEAN menyatukan mitos-mitos rasional dari lingkungannya. Ia tumbuh secara isomorfis dengan model-model yang ada dari berbagai organisasi yang absah, dengan

⁷ Anja Jetschke, "Institutionalizing ASEAN: Celebrating Europe through Network Governance" *Cambridge Review of International Affairs*, Vol. 22, No 3, 2009: 407-426.

⁸ Lihat 2 tulisan Rodolfo C. Severino, *Southeast Asia In Search of An ASEAN Community*, 2008, *op.cit.* dan ASEAN, 2006, *op.cit.*

⁹ Lihat, Wisnu Dewabrata, "Tiga Tahun yang Tersisa," *Kompas*, 2 Desember 2012: 10.

¹⁰ Jetschke, *loc.cit.*

mengesampingkan pertimbangan efisiensi dalam rangka memperoleh akses ke sumber daya, untuk meningkatkan daya tahan dan legitimasi.¹¹

Karena itu, sekalipun akan menjadi problematik bagi ASEAN dalam mewujudkan 5 tahun percepatan integrasinya, tujuan-tujuan yang tidak dinyatakan secara eksplisit tersebut menyediakan basis bagi konseptualisasi kekuatan-kekuatan yang menginformasikan baik daya tahan maupun pertumbuhannya di kawasan. Dalam berbagai tingkatan, ASEAN mendekati organisasi yang dilembagakan, yang hanya sedikit berorientasi pada pemenuhan efisien dari tujuan-tujuan yang dinyatakan secara eksplisit, dan lebih banyak fokus pada pengadopsian mitos-mitos rasional dari lingkungan mereka bagi pencapaian legitimasi dan keberlangsungan hidupnya.

Nair juga menggarisbawahi bahwa hadirnya tujuan-tujuan yang tidak jelas (kabur), pengalaman sejarah yang kaya dengan isomorfisme kelembagaan, dan bukti adanya keterpisahan (*decoupling*), membuat ASEAN bukan sebuah organisasi rasional. Hal ini juga disebabkan absennya birokrasi Weberian yang terpisah, yang bersandar pada sumber daya organisasi dan struktur formal birokrasi nasional masing-masing negara anggotanya, tidak hanya untuk dukungan logistik, tetapi juga bagi elaborasi kerja dan tujuan-tujuan organisasi. Memang selain terdapat berbagai keterbatasan kapasitas organisasi untuk merubah berbagai perilaku negara anggota, ketidakhadiran birokrasi yang terpisah memberikan kesempatan bagi elit politik nasional, dan birokrasi mereka, untuk mengejar tujuan-tujuan yang mungkin berkonflik dengan misi-misi organisasi yang telah dinyatakan secara eksplisit, serta juga dengan norma-norma yang pantas dari interaksi antarnegara (multilateral).

Ketidakhadiran ini telah memungkinkan elit politik nasional dan birokrasi mengejar, di antaranya 3 tujuan, yang tidak diungkapkan secara eksplisit,¹² yaitu (a) untuk konsolidasi kekuasaan domestik; (b) memperoleh legitimasi melalui asosiasi dengan struktur dan wacana normatif internasional—mengikuti perkembangan organisasi Uni Eropa, dan (c) menerapkan politik kekuasaan (*Realpolitik*). Sebagai contoh, absennya birokrasi Weberian telah dimanfaatkan oleh elit penguasa di negara anggota untuk melakukan konsolidasi kekuasaan domestik untuk menghadapi tantangan pemberontakan komunis di kawasan Asia Tenggara.

Dalam konteks ini, sebuah contoh untuk butir (a) menurut Nair, tujuan yang tidak diungkapkan di kalangan pemimpin ASEAN ketika itu, seperti dicatat PM Singapura Lee Kuan Yew, adalah menjalin kekuatan untuk membangun solidaritas. Dengan kata lain, *Treaty of Amity and Cooperation* telah dibuat

¹¹ Deepak Nair, "Do Stated Goals Matter? Regional Institutions in East Asia and the Dynamic of Unstated Goals," *RSIS Working Papers*, No. 199, 2010.

oleh negara anggota ASEAN untuk mendekati dan mengajak rejim-rejim komunis yang baru menang dan berkuasa di negara Indocina untuk bergabung dengan ASEAN. Sementara, tujuan-tujuan yang telah dideklarasikan oleh ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana kita ketahui bersama, kemajuannya sangat lambat dicapai. Contoh lain, penetapan zona damai, bebas dan netral di kawasan Asia Tenggara (ZOPFAN), secara retorika dibuat untuk memberi jarak antara ASEAN dari AS, dan sebaliknya, menarik kekuatan-kekuatan komunis yang baru naik dan menikmati kemenangannya di Indocina agar menghormati netralitas formal negara Laos dan Kamboja.

Untuk butir (b), Nair mengutip studi Jetschke dan Rueland, yang menggarisbawahi pernyataan-pernyataan pemimpin Thailand dan Malaysia, yaitu Thanat Khoman dan Syeh Hamid Albar yang mengungkapkan bahwa model ASEAN masih dalam kerangka Uni Eropa.¹³ Kemudian, contoh lain, Piagam ASEAN (*The ASEAN Charter*) dibuat untuk mengamankan identitas ASEAN sebagai sebuah institusi yang absah di dalam komunitas negara-negara modern.¹⁴ Di sini, ASEAN tumbuh secara isomorfis, dari mimetik ke koersif, dengan model-model yang sedang eksis, dan mengenyampingkan pertimbangan-pertimbangan efisiensi dalam rangka mendapatkan akses ke sumber daya dan meningkatkan keberlangsungan hidup dan legitimasinya. Contoh yang sama dapat dilihat dalam sikap ASEAN yang tidak jelas (abu-abu) dalam menyikapi masalah pelanggaran HAM di negara anggotanya, seperti Indonesia dalam kasus Timtim, dan, yang lebih aktual, Myanmar.

Untuk contoh butir (c), bisa dilihat pula dalam keputusan ASEAN menawarkan keanggotaan kepada Myanmar dan kebijakannya di kemudian hari dalam mengintroduksi apa yang disebut sebagai *constructive engagement*. Nair menilai langkah ASEAN ini dimotivasi pula oleh keinginan para pemimpin ASEAN untuk mengawasi apa yang mereka persepsikan sebagai strategi China yang terus berkembang dalam mengontrol junta militer Myanmar dan sekaligus juga untuk mengawasi kecurigaan mereka atas Cina yang berupaya mencari pangkalan bagi angkatan lautnya di kawasan Asia Tenggara.¹⁵

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*; Anja Jetschke and Juergen Rueland, "Decoupling rhetoric and practice: the cultural limits of ASEAN cooperation," *The Pacific Review*, Vol. 22 No. 2, 2009: 179-203.

¹⁴ Nair, mengutip Hiro Katsumata, "Mimetic Adoption and Norm Diffusion: ASEAN Security Community, Free Trade and Human Rights," *APSA 2009 Toronto Meeting Paper*.

¹⁵ Nair, mengutip Eric Martinez Kuhonta, "Walking a tightrope: democracy versus sovereign-ty in ASEAN's illiberal peace," *The Pacific Review*, 2006.

II. Pembahasan

A. Lokalisasi atau Difusi Norma?

Jetschke and Rueland, lebih jelas lagi menggambarkan eksistensi ASEAN sebagai sebuah perkawinan dengan karakter yang mendua, sebagai kombinasi proyek integrasi Uni Eropa dan strata budaya yang mendalam dan persisten dari proyek di Asia Tenggara, yang menentukan batas-batas dari kerja sama yang ada. Sehingga logis, struktur sosial dan budaya politiknya tidak menghasilkan mekanisme yang mungkin memfasilitasi kerja sama internasional.¹⁶ Secara lebih jelas lagi diungkapkan, dua peristiwa besar dalam hubungan internasional, yakni Perang Dingin dan krisis keuangan di kawasan, telah menunjukkan bahwa respons ASEAN yang dominan terhadap tantangan perkembangan gagasan utama merupakan kombinasi dari bentuk lokalisasi dan inerti, yang tidak diikuti oleh berbagai praktek perubahan mendasar. Pembicaraan dewasa ini tentang perubahan-perubahan mendasar di dalam ASEAN, dalam kenyataannya tidak baru, namun mempunyai sejarah panjang di antara anggotanya. ASEAN telah menyikapi tantangan-tantangan ideational dewasa ini dengan mengintensifkan proses lokalisasi norma, walaupun salah satunya diwarnai oleh sikap inerti yang kuat.

Baik Jetschke maupun Rueland telah meragukan bahwa berbagai upaya pembaruan kelembagaan dan kebijakan yang telah dilakukan ASEAN setelah krisis keuangan yang melanda Asia adalah titik awal dari sebuah transformasi utama dari kerja sama budayanya.¹⁷ Lebih dalam lagi, kedua pakar hubungan internasional itu dalam karya yang berbeda telah memetakan ASEAN seperti berikut.¹⁸ Dari perspektif realis dan aliran Inggris, ASEAN digambarkan berpusat pada kekuasaan dan negara, serta harus dipahami dalam kondisi masyarakat yang anarkis dan perspektif perimbangan kekuatan di kawasan. Dalam perspektif liberal, ASEAN merupakan organisasi yang lemah pelembagaannya, yang telah kehilangan landasannya setelah krisis ekonomi melanda Asia. Berbagai tekanan fungsional, jika sukses, dapat meningkatkan legalisasi dan kontraktualisasi hubungan internasionalnya; sementara, demokratisasi di negara anggotanya, dalam tingkatan tertentu, telah meningkatkan tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat sipil, kemajemukan kebijakan luar negeri, serta menciptakan tekanan pada ASEAN

¹⁶ Jetschke and Rueland, 2009, *loc.cit.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Juergen Rueland and Anja Jetschke, "40 years of ASEAN: perspectives, performance and lessons for change," *The Pacific Review*, Vol. 21, No. 4, 2008: 397-409.

sebagai sebuah organisasi untuk memasukkan demokrasi sebagai sebuah norma kunci.¹⁹

Dari perspektif konstruktivist, yang mengeksplorasi hubungan agen dan struktur, serta menekankan faktor-faktor ideational regionalisme di Asia Tenggara, sambil mengutip Acharya,²⁰ Jetschke dan Rueland mencatat bentuk-bentuk kerja sama yang sudah terlembaga.²¹ Mereka juga mencatat negara anggota telah berupaya mengembangkan norma-norma kolektif bagi perilaku bersama yang damai, yang membentuk identitas anggotanya. Sehingga, konstruktivist telah mencatat stabilitas mengagumkan yang telah berhasil diciptakan ASEAN, dan terhadap konsistensi atas prinsip yang dijalkannya. Juga, sambil mengutip Kivimaki,²² Jetsche dan Rueland memperhatikan, bahwa ASEAN, walaupun tidak mempromosikan kerja sama dan resolusi konflik, telah mengizinkan negara anggotanya untuk mengembangkan perangkat kerja sama yang dapat diprediksi di antara mereka.²³ Karenanya, Kivimaki telah mengingatkan bahwa relevansi ASEAN tergantung pada apa yang telah direncanakan mereka, dan bukan yang diharapkan orang luar untuk dapat dilihat berlangsung, dan juga bukan pada dasar-dasar ideational ASEAN dan kecocokannya pada hasilnya. Sehingga, dalam menganalisis ASEAN, kita perlu mengaitkan akar sejarah dari kerjasama budaya negara anggota, kolonialisme, dekolonisasi, dan sikap berbeda dalam kepercayaan dan kewajiban sosial mereka.²⁴

Lebih jauh lagi, sambil mengutip analisis lainnya, yaitu Narine,²⁵ yang liberal-institutionalist, Jetschke dan Rueland mencatat bahwa nilai yang dihormati bersama di antara negara anggotanya, tidak dengan sendirinya mencerminkan identitas bersama. Yang patut diperhatikan di sini adalah nilai-nilai inti ASEAN terkait dengan realisme politik yang ada, yang mungkin menyediakan potensi signifikan bagi pengingkaran, langkah mundur, dan tindakan pembatalan sepihak dari keputusan anggotanya. Sehingga, prospek

¹⁹ Sambil mengutip J. Dosch, "ASEAN's reluctant liberal turn and the thorny road to democracy promotion," *The Pacific Review*, 2008, Jetschke dan Rueland, 2009, melihat masih adanya optimisme dari analisis lain, yang mengharapakan ASEAN, melalui piagam yang baru disahkannya (*The ASEAN Charter*) dapat mengintroduksi sebuah proses *bottom-up* dari difusi norma yang dapat menghasilkan tekanan pada negara-negara anggotanya yang belum demokratis, untuk memperbarui kehidupan politik mereka. Lihat kembali, Jetschke dan Rueland, 2009, *loc.cit*.

²⁰ Amitav Acharya, *Constructing A Security Community In South East Asia - ASEAN and the Problem of Regional Order*. Engelska: Taylor & Francis Ltd, Engelska, 2001.

²¹ Jetschke and Rueland, 2009, *loc.cit*.

²² Timo Kivimaki, "Power, interest or culture – is there a paradigm that explains ASEAN's political role best?", *The Pacific Review*, Vol. 21, 4, 2008.

²³ Jetschke and Rueland, 2009, *loc.cit*.

²⁴ Kivimaki, 2008, *loc.cit*.

²⁵ Lihat Shaun Narine, *Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia*, Boulder, Co, Lynne Rienner, 2008.

perubahan ditentukan oleh ketidakinginan negara Indocina, yang baru masuk menjadi anggota ASEAN, dalam merubah nilai-nilai inti kelompok, dan oleh kerawanan yang terus berlanjut dari negara anggotanya yang masih terbebani upaya menciptakan negara yang dapat berfungsi dengan baik. Wajar saja kemudian muncul penekanan di kalangan ASEAN pada pentingnya nilai kedaulatan. Seorang analis lain yang dikutip Jetschke dan Rueland, yakni Haacke, telah memperjelas, dari hasil analisisnya secara mendalam, bagaimana kolonialisme di masa lalu telah mempengaruhi pemikiran dan pilihan para *Founding Fathers* di negara anggota ASEAN, dan juga para pemimpin baru mereka, untuk menekankan sangat pentingnya kedaulatan nasional dan upaya mengembangkan ketahanan nasional sebagai basis dan sumbangan bagi ketahanan kawasan, serta prinsip non-intervensi, yang kontradiktif dengan konsep keamanan koperatif.²⁶

Bagaimanapun, pada akhirnya kedua Indonesianist asal Jerman itu telah sampai pada penilaian bahwa kemajuan institusional yang telah dicapai ASEAN, ataupun penyesuaian norma yang telah dilakukan ASEAN kepada lingkungan yang berubah, tampaknya hanya berkembang sedikit demi sedikit atau bersifat inkremental. Sehingga, ASEAN merupakan sebuah organisasi yang tercabik dengan perbedaan mendalam antara anggota lama dan baru, atau antara mereka yang dapat dikategorikan sebagai pembaruan dengan tradisional. Bahkan, dengan begitu yakin, mereka mengatakan, jika diprediksikan 10 tahun lagi dari sekarang, setelah setengah abad sejak berdirinya, ASEAN tidak akan pernah berubah menjadi suatu entitas yang mempunyai karakter yang lebih *legalized* atau memiliki budaya kerja sama kontraktual. ASEAN juga tidak akan dapat menjadi sebuah Uni Eropa model Asia, ataupun dilupakan, namun tetap akan menjadi ASEAN sebagaimana adanya yang tampak dewasa ini.

Sementara, Rother,²⁷ mendukung penilaian Rueland secara pribadi yang dalam tulisannya sejak dini telah berargumen bahwa ASEAN memiliki identitas kolektif yang dangkal, yang rawan terhadap krisis, dan didasarkan pada denominator bersama yang sangat kecil. Sebagai konsekuensinya, ASEAN memiliki faktor yang rawan perpecahan untuk menjalankan politik di kawasan. Dengan kata lain, Rother mengingatkan, terdapat kepentingan di balik konstruksi ideational. Ia mengingatkan bahwa difusi norma membutuhkan

²⁶ Lihat Juergen Haacke, *ASEAN's diplomatic and security culture: Origins, development and prospects*. London and New York: RoutledgeCurzon, 2003; Juergen Haacke, "ASEAN's diplomatic and security culture: a constructivist assessment," *International relations of the Asia-Pacific*, 3 (1), 2003: 57-87.

²⁷ Stepan Rother, *Normen, Identitaeten und die Logik der Anarchie: Die ASEAN aus Konstruktivischer Perspektive*, Freiburg: Arnold-Bergstraesser Institut, 2004.

sebuah kondisi yang memungkinkan dapat diciptakannya sebuah identitas kolektif.²⁸

Acharya, yang banyak membedah ASEAN melalui karya-karya kritisnya, dengan menggunakan *historiographical concept*, berpendapat, bahwa masyarakat Asia Tenggara bukanlah penerima pasif gagasan-gagasan budaya dan politik asing, dari India dan Cina, tetapi merupakan peminjam dan pelokalisasi aktif gagasan-gagasan tersebut.²⁹ Di sini, lokalisasi merupakan sebuah proses transmisi gagasan dalam hal mana masyarakat Asia Tenggara meminjam gagasan-gagasan asing tentang kewenangan dan legitimasi, dan menyesuakannya dengan tradisi-tradisi dan praktek-praktek setempat yang ada. Sehingga, jika gagasan-gagasan yang akan dikonstruksikan itu cocok dengan tradisi-tradisi yang ada, semua itu akan dapat lebih mudah dan baik diterima, dibandingkan dengan gagasan-gagasan yang tidak memiliki potensi seperti itu.

Agen lokal ingin melokalisasi norma-norma internasional, karena,³⁰ *pertama*, adanya ancaman keamanan atau krisis ekonomi serius, seperti depresi atau perang yang dapat menciptakan kebutuhan bagi peminjaman nilai, dengan mempertanyakan aturan main yang ada. *Kedua*, adanya perubahan sistemik seperti perubahan distribusi kekuasaan dan kepentingan, dan interaksi dengan negara-negara besar. Sebagai contoh, berakhirnya Perang Dingin membuat populer norma Eropa tentang kerja sama keamanan yang menarik perhatian aktor regional di kawasan lain, antara lain di ASEAN. *Ketiga*, perubahan politik domestik di negara peminjam/peniru norma. Contohnya, *keempat*, rejim-rejim demokratis baru mengadopsi gagasan untuk promosi HAM dan bantuan luar negeri sebagai basis dari kebijakan luar negeri mereka, untuk melegitimasi kewenangan dan identitas baru mereka. *Kelima*, akibat terjadinya efek internasional, sehingga mendorong terjadinya proses peminjaman norma melalui proses emulasi, imitasi, penularan, dan lain-lain.

Tuntutan lokalisasi norma/nilai muncul, karena, menurut perspektif rasionalist, lokalisasi jauh lebih sederhana, terutama jika nilai-nilai yang mau diadopsi sudah melekat di dalam institusi-institusi lokal yang kuat. Sehingga, lebih mudah untuk memelihara dan menyesuaikan (nilai-nilai) kelembagaan yang ada daripada menciptakan yang baru. Juga, beberapa karakter kunci dari tata nilai yang ada lebih mudah dipelihara daripada diganti

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Amitav Acharya, "How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism," 2004, *International Organization*, Vol. 58, April 2004: 239-275.

³⁰ *Ibid.*

keseluruhannya. Namun, prospek lokalisasi norma tergantung pada dampak positif pada legitimasi dan kewenangan peminjam/peniru norma kunci. Norma luar baru itu dapat digunakan untuk memperkuat legitimasi dan kewenangan institusi dan prakteknya, tanpa merubah secara mendasar identitas sosial yang sudah ada. Kemudian, norma baru itu dapat memperkuat norma-norma lokal sebelumnya. Prospek lokalisasi norma tergantung pula pada kredibilitas dan prestise agen, aktor, dan pendukung lokal, serta respons atau perlakuan kultur dan tradisi asli, selain pada seberapa luas tertanam dan melekatnya pengaruh norma-norma asing tersebut.³¹

Sebagaimana juga yang dipahami kalangan konstruktivist, difusi norma adalah hasil perilaku yang adaptif dalam hal mana praktek-praktek lokal konsisten dengan gagasan eksternal; dan sebaliknya, ia menggambarkan sebuah proses di mana gagasan eksternal berjalan secara simultan, sesuai dengan praktek-praktek lokal. Itulah sebabnya, karena lokalisasi norma berlangsung dalam skala kecil, norma global intervensi kemanusiaan dalam kerangka *flexible engagement*, yang diusulkan Thailand, sebagai respons atas krisis ekonomi serius yang dihadapi anggota ASEAN, memperoleh sambutan yang minim dari anggota ASEAN dibandingkan norma Eropa tentang keamanan bersama (*common security*) yang telah ditolak oleh negara besar terutama AS. Sedangkan gagasan keamanan koperatif yang mencakup dialog dan kerja sama keamanan, menggantikan norma ZOPFAN yang terlalu berpandangan ke dalam (*inward looking*), dengan pendekatan yang lebih inklusif, yaitu pengadopsian institusi keamanan baru ASEAN Regional Forum (ARF) sebagai instrumen kebijakan baru, yang merupakan upaya membangun rasa saling percaya (*confidence building measure*) yang didasarkan pada model ASEAN. Yang jelas, keterikatan luwes (*flexible engagement*) tidak menghasilkan perubahan institusional yang berarti. ASEAN tetap mengabaikan HAM, dan bantuan untuk demokrasi dan norma penting, yakni nonintervensi, eksis. Sementara, walaupun instrumen-instrumen kebijakan baru diciptakan, kondisinya tetap lemah dan terbatas.

Sehingga, tanpa difusi norma, ASEAN tetap kokoh dengan norma aslinya, dan Barat pun demikian. Buat Barat, norma HAM yang penting adalah bebas dari rasa takut, sedangkan bagi ASEAN yang utama adalah bebas dari kemiskinan. Itulah sebabnya, negara anggota ASEAN bersikap tidak jelas dalam memberikan dukungan terhadap perang melawan terror. ASEAN diketahui mendukung interaksi yang diperkuat (*enhanced interaction*) dan keterikatan yang konstruktif (*constructive engagement*), serta mementingkan

³¹ *Ibid.*

³² Acharya, 2001, *op.cit.*

kedaulatan negara dan peran militer, sedangkan Barat sangat mendukung kebijakan isolasi dan sanksi, serta intervensi, mengurangi peran negara, dan lebih memperhatikan peran masyarakat sipil dan kehidupan warga. Karena itulah, Acharya melihat adanya pertentangan antara norma intervensi kemanusiaan dan kedaulatan negara yang dipegang teguh ASEAN.³²

B.Skeptisisme terhadap Terwujudnya Komunitas ASEAN 2015

Sebagai konsekuensinya, ASEAN akan kesulitan untuk memenuhi targetnya mewujudkan integrasi politik pada 2015. Sebab, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan para anggotanya untuk menciptakan sistem politik yang demokratis, yang menghargai kebebasan berpendapat, karena masih berlangsungnya sistem politik yang otoriter, atau aturan politik yang represif, seperti *Internal Security Act (ISA)*, dan tekanan atas kelompok-kelompok oposisi. Secara spesifik, ASEAN akan kesulitan untuk menciptakan sebuah komunitas keamanan (*security community*) pada 2015, karena keterlibatan masyarakat sipil masih rendah, dan yang ada baru rejim keamanan (*security regime*), yang tidak memiliki persepsi dan pengalaman menghadapi ancaman keamanan yang sama, seperti halnya anggota NATO.³³

Seperti juga APEC dan organisasi kerja sama kawasan Asia lainnya, ASEAN tidak memiliki hubungan yang erat dengan basis politik rakyat pendukungnya.³⁴ Jika ditelaah di setiap negara anggotanya, terdapat keberagaman yang tinggi dalam sistem politik yang diterapkan di sana, termasuk dalam pelaksanaan mekanisme pergantian kepemimpinan nasionalnya. Ada negara anggota yang sudah siap menyelenggarakan mekanisme pergantian kepemimpinan nasional melalui pemilu yang bebas dan jujur; ada yang masih tertutup atau setengah terbuka dan masih diragukan kejujuran pelaksanaan pemilunya. Kebebasan politik dan media massa dan organisasi massa serta jaminan kesamaan di depan hukum masih belum standar dilindungi di negara anggota ASEAN. Tidak heran, terwujudnya ASEAN sebagai sebuah komunitas politik, masih jauh panggang dari api. Sebab, *roadmap* pembentukan sebuah Parlemen ASEAN (*ASEAN Parliament*) masih bersifat tarik-ulur atau maju-mundur, tanpa kemajuan yang signifikan.³⁵ Dalam

³³ Lihat, Amitav Acharya, "Why Is There No NATO in Asia? The Normative Origins of Asian Multilateralism," *Working Paper 05-05*, Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, Juli 2005.

³⁴ Robert W. Cox, "Gramsci, Hegemony, and International Relations: An Essay In Method," *Millennium Journal of International Studies*, Vol. 12, No. 2, Summer 1983.

³⁵ Poltak Partogi Nainggolan, "Jalan Panjang Menuju Parlemen ASEAN," *Sinar Harapan*, 28 Agustus 2006; Poltak Partogi Nainggolan, "Parlemen ASEAN, Mungkinkah Terwujud," *Sinar Harapan*, 25 Agustus 2007.

beberapa dasawarsa sejak inisiatif didirikannya di awal tahun 1970, perhimpunan parlemen negara-negara anggota ASEAN atau *ASEAN Inter-Parliamentary Organization* (AIPO) hanya berhasil merubah nama menjadi *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) pada 2007, tanpa berbagai hasil keputusan politik yang harus ditindaklanjuti atau diimplementasikan oleh masing-masing negara anggotanya. Sungguh sebuah pemborosan besar, beberapa dasawarsa perjalanan politik ASEAN dilalui hanya untuk menghasilkan perubahan nama *Organization* menjadi *Assembly*, tanpa kemajuan signifikan menuju pembentukan sebuah komunitas politik di kawasan. Kegiatan pertemuan ASEAN yang jumlahnya begitu banyak setiap tahun, termasuk yang dilakukan perhimpunan parlemennya, menghasilkan begitu banyak kertas keputusan dalam bentuk resolusi-resolusi kebijakan yang tidak wajib dijalankan akibat ketiadaan sanksi dan belum dapat diterimanya kehadiran ASEAN sebagai sebuah organisasi supranasional di kawasan Asia Tenggara oleh negara-negara anggotanya.³⁶

ASEAN juga akan menghadapi kesulitan untuk meraih sasarannya menciptakan integritas ekonomi dengan kehadiran sebuah komunitas ekonomi di kawasan, karena ditempuhnya jalan belakang,³⁷ yakni dibuatnya perjanjian perdagangan bebas secara bilateral, yang tidak merefleksikan kepentingan kolektif, namun sepihak, oleh negara anggota ASEAN dengan negara-negara non-ASEAN. Masalah infrastruktur yang buruk di beberapa negara anggota, dan minimnya realisasi dari kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, seperti *The Bali Concord (I)*, serta rendahnya frekuensi perdagangan antar-negara anggota³⁸—inipun cenderung berjalan karena desakan negara UE dan bukan dari dorongan kebutuhan domestik—mempertinggi tingkat kesulitan ASEAN dalam mewujudkan integrasi ekonominya. Dalam kenyataannya, walaupun telah dimajukan 5 tahun lebih awal, dalam rencana integrasi masyarakat ASEAN masih terdapat jurang yang lebar antara sasaran dalam *Bali Concord II* dan *roadmap* dalam *Bali Concord III* dengan realisasinya dewasa ini. Ini belum memperhitungkan kesenjangan kemajuan ekonomi dan tingkat penghasilan dan kesejahteraan yang terjadi antara kelompok negara

³⁶ Lihat berbagai resolusi yang telah dihasilkan AIPO dan efektifitasnya dalam, Poltak Parto-gi Nainggolan *et al*, *Twenty Five Years ASEAN Inter-Parliamentary Organization* (Volume I dan II), Jakarta: AIPO Secretariat General, 2003.

³⁷ Langkah Malaysia menggagas berdirinya *East Asia Summit* dengan mendukung peran sekutu keamanannya dalam pakta Anzus, Australia, adalah contoh kentara tentang itu. Demikian pula dengan langkah Singapura menandatangani perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan AS dan juga dengan Australia.

³⁸ Perdagangan internal di antara negara anggota melalui AFTA hanya sekitar 24-25%, sedangkan UE mencapai 65%. Lihat, "Students question ASEAN's benefits," *The Jakarta Post*, 8 Maret 2011: 12.

Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia dengan Indonesia, Thailand, Filipina, Viet Nam, Kampuchea, dan Laos.

Contoh lain, yang lebih spesifik, tentang kesenjangan perkembangan ekonomi ini adalah, banyak munculnya bank negara anggota ASEAN di Indonesia, sementara hanya terdapat sekitar 1-2 bank Indonesia di negara anggota ASEAN lain. Sementara itu, perdagangan bebas ASEAN dengan negara lain, misalnya RRC, telah menghasilkan defisit perdagangan bagi Indonesia hingga 10 miliar dolar AS.³⁹ Kemudian, International Labour Organization (ILO) melaporkan bahwa realisasi perdagangan bebas ASEAN-RRC telah menyebabkan terjadinya serbuan produk RRC ke Indonesia secara bertahap sejak 1 Januari 2010 dan menekan kinerja industri padat karya dan melenyapkan sedikitnya 150 ribu kesempatan kerja di Indonesia.⁴⁰ Dengan demikian, realisasi perdagangan bebas ASEAN-RRC telah mengakibatkan kerugian besar untuk salah satu negara anggotanya, yang merupakan negara terbesar secara geografis di kawasan, dan sekaligus pendiri ASEAN. Ini belum termasuk dampak negatif serupa yang dialami negara anggota ASEAN lainnya, yang belum memiliki kesiapan dalam sumber daya manusia dan menciptakan pasar kerja domestik yang kompetitif. Indonesia saja selama ini dilaporkan hanya dapat meraih manfaat yang sedikit dari persetujuan perdagangan bebas yang telah disepakati dan direalisasikan.⁴¹ Padahal, dalam kondisi demikian pun, ASEAN terus didorong untuk meliberalisasi dirinya.⁴²

Begitu pula, ASEAN akan sulit mencapai sasarannya menciptakan sebuah komunitas sosial dan budaya, karena terus bermunculannya konflik-konflik yang disebabkan oleh klaim tumpang-tindih atas warisan nilai budaya rakyat di negara anggotanya. Sedangkan apa yang dikatakan sebagai identitas kolektif juga belum tumbuh dan berkembang baik. Berbagai perbedaan dalam politik, ekonomi, dan masyarakat —perbedaan esensial modalitas yang ada, termasuk sosial-budaya, menurut Dewi Fortuna Anwar⁴³— di negara anggotanya mempersulit ASEAN untuk dapat melakukan integrasi komunitas secara lebih mendalam. Masih terbatasnya keterhubungan (*connectivity*) ASEAN di antara negara anggotanya dan dengan berbagai organisasi regional dan komunitas di luar kawasan juga menjadi penghambat integrasinya menjadi sebuah komunitas (di) kawasan Asia Tenggara.⁴⁴

³⁹ Fitria Andayani, "Defisit Perdagangan Cina-RI 10 Miliar Dolar," *Republika*, 10 April 2012: 18.

⁴⁰ "Perdagangan Bebas Tekan Peluang Kerja," *Kompas*, 8 Februari 2012: 18.

⁴¹ Lihat, Linda Yulisman, "RI gains only slightly from free trade deals," *The Jakarta Post*, 19 Maret 2012: 6.

⁴² Lihat pula, Linda Yulisman, "ASEAN needs to liberalize 'realistically,'" *The Jakarta Post*, 3 April 2012: 1.

⁴³ Lihat, Faustinus Andrea, "Tantangan Keamanan ASEAN Tahun 2015," *Analisis CSIS*, Vol. 40, No. 4, Desember 2011: 514.

⁴⁴ Lihat, Hasjim Djalal, "ASEAN Connectivity," *Media Indonesia*, 18 April 2012: 20.

Piagam ASEAN secara realistis tidak dapat secara efektif mendorong integrasi ASEAN. Ia tidak mampu mencegah dan mengurangi secara efektif ketegangan politik yang dipicu oleh klaim-klaim teritorial yang tumpang tindih serta pertikaian politik antara angkatan bersenjata negara anggotanya. Tidak adanya sanksi dan hukuman, bahkan secara moral, bagi negara anggota yang melanggarnya, telah membuat Piagam ASEAN cenderung sebagai dokumen sejarah daripada konstitusi entitas atau komunitas regional yang berlaku. Dengan kata lain, seolah tidak ada kewajiban negara anggota untuk menaati isi piagam. Pasal 8, mengenai penyelesaian sengketa, misalnya, tidak dapat diterapkan secara efektif untuk penyelesaian sengketa teritorial di antara negara anggota, karena tidak adanya mekanisme supranasional; dan ironisnya, prinsip non-intervensi dipertahankan. Contoh empirik adalah penyelesaian insiden yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perairan Tanjung Berakit.

Sebelumnya, Pasal 14, *ASEAN Treaty of Amity and Cooperation*, terkait peran *High Council*, tidak pernah dapat diterapkan, karena adanya kedaulatan nasional yang kuat di antara negara anggota ASEAN. Sehingga dapat disimpulkan, para pemimpin ASEAN tampak lebih realis daripada institusionalis. Dalam kenyataannya, *High Council* tidak digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa teritorial yang muncul belakangan, termasuk dalam klaim atas kawasan Candi Preah Vihear, yang berlokasi di perbatasan Thailand dan Kampeuchea. Bahkan, pihak Thailand masih menolak peran pihak ketiga dari anggota ASEAN, termasuk Indonesia yang tengah memegang posisi sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011 lalu.⁴⁵ Sehingga, merupakan hal yang mengejutkan bagi dunia internasional, ASEAN yang selama beberapa dasawarsa dipuji mampu menjaga harmoni di antara negara anggotanya, dan juga stabilitas kawasan, justru terus mempertontonkan konflik bersenjata langsung antara 2 negara anggotanya yang bertetangga, untuk memenangkan klaim sepihak atas kawasan Candi Preah Vihear, yang telah menyebabkan korban tewas dalam *clash* terakhir sebanyak 12 orang.⁴⁶ Ini belum termasuk korban-korban berjatuh dalam beberapa insiden sebelumnya, dan puluhan ribu warga di dekat perbatasan yang harus mengungsi.

⁴⁵ Pemerintah Thailand telah menolak menghadiri pertemuan segitiga antara Thailand, Kampeuchea dan Indonesia yang telah dijadwalkan digelar di Bogor, Indonesia, pada 7-8 April 2011. Lihat, misalnya, "Sengketa Preah Vihear: PM Thailand Tolak Peran RI," *Media Indonesia*, 12 April 2011: 12.

⁴⁶ "Thailand Minta Bertemu: Kunjungan Marty Batal, Penandatanganan TOR Pasukan Pemantau Terganjil," *Kompas*, 26 April 2011: 11.

Lebih jelas lagi, sejak lama, kehadiran *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) tidak dapat menyelesaikan secara efektif konflik-konflik teritorial di Laut Cina Selatan yang terjadi pada tahun 1974, 1977, 1998, dan 2003. Dalam perkembangan terakhir, sikap negara anggota ASEAN yang tidak bisa juga menyatu —terutama mereka yang terlibat dalam klaim tumpang tindih atas wilayah perairan dan kepulauan di Laut Cina Selatan— dalam menghadapi RRC dan mencari solusi konflik permanen, sangat disesalkan oleh banyak pihak, termasuk pengamat hubungan internasional dan kawasan.⁴⁷ Kenyataan memperlihatkan, alih-alih semakin bertambah usianya, ASEAN semakin mudah menghasilkan sebuah solusi bersama dalam mengatasi konflik teritorial di kawasan yang melibatkan negara anggotanya dan kekuatan luar, melalui pembuatan sebuah *Code of Conduct*, ia justru kian rapuh, mengalami perpecahan sikap akibat dipengaruhi tekanan asing, khususnya negara besar seperti RRC yang terus berhasil mendikte dengan solusi bilateralnya. Kepentingan anggotanya yang begitu beragam telah membuat ASEAN tidak mungkin untuk mengambil respons yang sama dalam menyikapi klaim kedaulatan absolut Beijing atas Laut Cina Selatan.⁴⁸ Sama dengan TAC dan *Bali Concord II* (2008), kehadiran *The ASEAN Charter* tidak dapat mencegah dan mengurangi ketegangan-ketegangan politik di antara negara anggota, yang muncul dari klaim dan sengketa teritorial. Sementara, *roadmap* yang disusun dalam Bali Concord III, hasil KTT ASEAN ke-19 di Bali pada Nopember 2011, juga masih diragukan efektifitasnya untuk dapat merespons tantangan keamanan kawasan menjelang *deadline* pembentukan Komunitas ASEAN tahun 2015 maupun pasca-2015.⁴⁹ Itulah sebabnya, ASEAN, dalam analogi terkini, diibaratkan sebuah rumah yang terbagi.⁵⁰

Konflik baru terus bermunculan, termasuk dalam menangani masalah tenaga kerja migran, yang menghangat kembali belakangan antara Malaysia dan Indonesia, setelah tertembak matinya 3 pekerja migran asal Indonesia (Tenaga Kerja Indonesia —TKI) oleh aparat kepolisian Malaysia. Sementara, masalah penganiayaan TKI, TKI ilegal, dan tindakan diskriminatif terhadap mereka dari masa lalu masih membayangi hubungan bilateral kedua negara. Anehnya, secara simultan, ASEAN terus mengeluarkan atau menghasilkan

⁴⁷ Rizal Sukma, "ASEAN dan Sengketa Laut Cina Selatan," *Kompas*, 11 April 2012: 7. Selanjutnya, menjadi logis, harapan ASEAN agar dapat memainkan peran aktif sebagai juru damai untuk menengahi konflik Semenanjung Korea, sebagai anggota *the Six Party talks*, adalah sebuah ilusi, mengingat keterbatasan kemampuan ASEAN, selain gesekan kepentingan RRC-Rusia-Korea yang sulit untuk diharmoniskan dengan kepentingan AS-Jepang-Korsel. Lihat, Rene Pattiradjawane, "Ilusi ASEAN Perdamaian Korea," *Kompas*, 30 Mei 2012: 10.

⁴⁸ Ian Storey, "ASEAN is a House Divided," *The Asian Wall Street Journal*, 15-17 Juni 2012: 11.

⁴⁹ Andrea, 2011, *loc.cit.*: 514 *et seq.*

⁵⁰ Storey, *loc.cit.*

deklarasi, resolusi, dan *statements* tentang masalah tenaga kerja migran, termasuk yang dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan perkumpulan parlemennya, *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly—AIPA*, serta membentuk komisi implementasinya. Dalam realitas, solusi yang bisa dilakukan untuk menangani persoalan TKI hanya upaya diplomasi dan pembuatan kesepakatan bilateral, yaitu penyusunan Memorandum Kesepahaman (*Memorandum of Understanding –MOU*), yang bersifat sementara, karena tidak dapat menjamin selesainya konflik secara tuntas. Sehingga, untuk merespons masalah TKI dipertanyakan adakah sebuah cara ASEAN (*An ASEAN Way*) yang efektif untuk ini.⁵¹ Tetapi, yang lebih penting lagi, semakin sering dipertanyakan, apa artinya ASEAN, jika ia tidak dapat mencegah, memediasikan, dan menyelesaikan konflik di antara negara anggotanya?

Jadi, dapat dikatakan, tidak terdapat tujuan-tujuan yang mengikat dengan pengenaan sanksi bagi para pelanggarnya dalam berbagai peraturan yang dibuat ASEAN, termasuk dalam *The ASEAN Charter, Bali Concord II*, dan *Bali Concord III*. Sebagaimana dikatakan Katsumata (2009), *The ASEAN Charter* hanya dimaksudkan untuk mengamankan identitas ASEAN sebagai sebuah institusi yang absah di dalam komunitas negara-negara modern. ASEAN sendiri tumbuh isomorfis—ada perubahan struktur formal, namun tidak ada perubahan norma dan *causal beliefs*—dari "*mimetic*" *isomorphism* ke "*coercive*" *isomorphism*, dengan model-model eksis dari organisasi-organisasi yang absah dan mengenyampingkan pertimbangan-pertimbangan efisiensi. Ini demi mendapatkan akses ke sumber daya, untuk memperkuat keberlangsungan hidupnya dan legitimasi. Tampak sekali, *The ASEAN Charter* memperlihatkan tekanan-tekanan mendua ASEAN atas masalah-masalah politik dan HAM yang dihadapi negara-negara anggotanya, terutama Myanmar. Sehingga, walaupun ia diklaim sebagai *legal personal*, *The ASEAN Charter* tidak dapat secara efektif dipakai atau diimplementasikan, karena ia tidak mengikat secara hukum, dan negara anggota memiliki kepatuhan yang rendah, selain keinginan yang rendah untuk memberikan sanksi hukum dan moral kepada pelanggarnya. Dalam kasus Myanmar, yang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran HAM di sana, justru AS dan Barat, yang mayoritas adalah anggota Uni Eropa (UE). Negara anggota ASEAN kemudian malah berlomba menekan AS dan Barat untuk segera mengakhiri sanksi,⁵² walaupun menurut analisis

⁵¹ Ben Perkasa Drajat, Direktur Sekolah Dinas LN di Kementerian LN Indonesia, dalam "An ASEAN way of protecting Indonesian migrant workers, *The Jakarta Post*, 3 Mei 2012: 7.

⁵² Lihat, "Jim Gomez dan Sopheng Cheag, "ASEAN leaders call for lift of Myanmar sanctions," *The Jakarta Post*, 5 April 2012: 12; juga, Fuller, Thomas. "West is pressed to lift Myanmar sanctions," *International Herald Tribune*, 4 April 2012.

hubungan internasional, belum waktunya, atau terlalu prematur, sampai pemerintah Myanmar telah membuat upaya yang serius dan konsisten untuk mengakhiri kekerasan yang disponsori negara selama ini.⁵³

Dengan demikian, Piagam ASEAN (*The ASEAN Charter*) yang dihasilkan dari pertemuan *Bali Concord II* tahun 2008 di Bali, tidak membuat ASEAN kian solid dan dapat meningkatkan integritas negara anggotanya menjadi sebuah komunitas kawasan seperti yang diharapkan secara optimis oleh para pemimpinnya. Ia juga bukan merupakan hasil kemajuan signifikan yang telah dicapai ASEAN. Ia lebih merupakan karya simbolik ASEAN dalam perkembangannya selama lebih 4 dasawarsa daripada sebuah solusi kunci masalah bersama. Yang lebih menyedihkan, negara anggota cenderung memperlakukan kehadiran Piagam ASEAN, seperti halnya resolusi-resolusi dan keputusan-keputusan ASEAN lainnya, sebagai retorika dan basa-basi daripada alat untuk mencapai kepentingan bersama. Kesenangan bermain retorika tidak surut, bahkan cenderung meningkat, seperti tampak dalam pelaksanaan dan pencapaian KTT ASEAN di Jakarta, Indonesia, pada 5-7 Mei 2011.⁵⁴ Sementara, kalangan tingkat akar rumput, selain terus melancarkan kritik tajam, telah mengajukan gugatan hukum terhadap upaya realisasi Piagam ASEAN melalui ketentuan-ketentuan pelaksanaannya di tingkat regional,⁵⁵ maupun pembuatan ketentuan (UU) nasional anggotanya. Lebih jelas lagi, sejumlah LSM, seperti *Institute for Global Justice* (IGJ), Infid, dan Petisi 28, telah mengirim gugatan atas UU No. 38/2008 tentang Ratifikasi Piagam ASEAN ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi (*judicial review*), karena dinilai melanggar konstitusi Indonesia (UUD 1945), khususnya pasal-pasal yang terkait tudingan legalisasi praktek liberalisasi perdagangan, yang memberikan basis hukum di kawasan untuk kebijakan neoliberalisme.⁵⁶ Sehingga, pertanyaan tentang apakah ASEAN sungguh-sungguh dengan integrasinya, atau ASEAN adalah (hanya sekedar) ASEAN, dan tidak bisa dipahami sebagai bagian dari *phenomenon* Asia yang lebih besar,⁵⁷ terus muncul dan diperdebatkan di kalangan akademisi. Karena itu pula, dalam *colloquium* baru-baru ini di Departemen Politik Internasional Albert-Ludwigs-

⁵³ Pendapat Alex Bookbinder dari the S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapore, dalam, "By-elections in Myanmar: Too early to lift sanctions," *The Jakarta Post*, 19 April 2012: 7. Lihat pula, Wisnu Dewabrata, "Represi: Reformasi Myanmar, Akankah Berlanjut," *Kompas*, 28 Mei 2012: 10.

⁵⁴ Lihat, "ASEAN, a community away," *The Jakarta Post*, 9 Mei 2011: 6.

⁵⁵ Lihat, Bagus BT Saragih, "Groups concerned over ASEAN charter," *The Jakarta Post*, 11 Juni 2012: 4.

⁵⁶ Lihat, "Sistem Ekonomi Liberal Melanggar UUD 1945," *Media Indonesia*, 8 Juni 2011: 4.

⁵⁷ Michael Ewing-Chow, *Associate Professor and WTO Chair in the Faculty of Law at the National University of Singapore*.

Universitaet Freiburg, Jerman, kembali hangat diperdebatkan, apa sebenarnya teori integrasi ASEAN?⁵⁸

Berdasarkan berbagai argumen di atas, dapat dilihat, sangat sulit bagi ASEAN untuk meraih tujuannya membentuk sebuah komunitas di kawasan pada tahun 2015. Masalahnya semakin kompleks dan berat jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat ASEAN yang sangat pluralistik dengan kondisi latar belakang perbedaan yang luas dalam etnisitas, bahasa, agama, ideologi, dan kepentingan. Tidak hanya itu, negara anggota ASEAN memiliki sistem politik yang berbeda, terutama kesenjangan perkembangan tingkat demokratisasi yang beragam.

Beberapa negara seperti Indonesia, Filipina, dan Thailand juga masih disibukkan dengan konflik-konflik internal, primordial, dan separatisme, dan di lain sisi, berjuang keras untuk mewujudkan konsolidasi demokratis mereka. Meningkatnya aktifitas kelompok-kelompok radikal turut menghambat para pemerintah nasional ASEAN dalam menciptakan pemerintahan yang stabil di negerinya masing-masing. Masalah-masalah politik nasional yang serius, yang tidak terselesaikan, dapat merusak stabilitas politik di negara anggota, tidak hanya Thailand, tetapi juga Myanmar yang baru bergabung,⁵⁹ dan bahkan, Malaysia dan Indonesia, negara pendirinya.

III. Penutup

Dengan modalitas dan kecakapan yang rendah dalam menyelesaikan isu-isu bilateral dan antarnegara anggotanya, dapat muncul lagi konflik-konflik berskala rendah yang dapat merusak stabilitas kawasan. Sementara, prinsip nonintervensi terus menghalangi ASEAN untuk dapat mentransformasikan dirinya sebagai sebuah masyarakat politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya di kawasan.

Lebih-lebih lagi, Indonesia sendiri melalui kepala pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, secara sepihak telah memperingatkan para pemimpin di Asia agar jangan melangkah terlalu jauh terkait dengan upaya integrasi ekonomi regional, mengingat dampak krisis global yang

⁵⁸ *Colloquium on "A Theory of ASEAN Integration," 27 April 2012, KG1 Room 1021, Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg, Baden Wuerttemberg.*

⁵⁹ Di Myanmar, dengan terus munculnya kekerasan atas kelompok minoritas Muslim Rohingya, lihat "No entry," *International Herald Tribune*, 14 Juni 2012: 1; juga "Myanmar ethnic violence: Bangladesh urged to keep border open," *The Jakarta Post*, 14 Juni 2012: 10. Karena itulah, penerapan status darurat oleh rejim militer setelah terjadinya kerusuhan antara etnis mayoritas Buddha dan minoritas Muslim Rohingnya (Rakhine), memberikan peringatan bahwa militer masih berkuasa, dan dapat mengembalikan keadaan seperti semula, atau kemunduran, sebelum ada reformasi dan keterbukaan politik. Lihat, Michael Vatikiotis, "Be realistic about change in Myanmar," *The Jakarta Post*, 15 Juni 2012: 7.

bermula di Eropa mulai dirasakan dampaknya ke kawasan, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Secara khusus, dikuatirkan sekali oleh pemimpin Indonesia, yang masih menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2012, dampak lebih luas dari integrasi ekonomi kawasan dan penerapan mata uang tunggal. Peringatan ini tentu saja menjadi sangat mengejutkan, dan sangat kontraproduktif terhadap tekad belakangan ini —sebelum krisis Eropa memperlihatkan dampaknya secara global— untuk mendorong terwujudnya integrasi ekonomi kawasan, atau ASEAN sebagai sebuah komunitas ekonomi, dan lebih luas lagi, sebagai sebuah komunitas tunggal di kawasan. Sehingga, lagi-lagi dipertanyakan, mau kemana ASEAN sesungguhnya melangkah?

Daftar Pustaka

- Adamrah, Mustaqim. "Students question ASEAN's benefits," *The Jakarta Post*, 8 Maret 2011: 12.
- Amitav, Achrya. "How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism," 2004. *International Organization*, Vol. 58, April 2004: 239-275.
- _____. "Why Is There No NATO in Asia? The Normative Origins of Asian Multilateralism," *Working Paper 05-05*, Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, Juli 2005.
- _____. *Constructing A Security Community In South East Asia -ASEAN and the Problem of Regional Order*. Engelska: Taylor & Francis Ltd, Engelska, 2001.
- Andayani, Fitria. "Defisit Perdagangan Cina-RI 10 Miliar Dolar," *Republika*, 10 April 2012: 18.
- Andrea, Faustinus. "Tantangan Keamanan ASEAN Tahun 2015," *Analisis CSIS*, Vol. 40, No. 4, Desember 2011: 509-525.
- "ASEAN, a community away," *The Jakarta Post*, 9 Mei 2011: 6.
- Barta, Patrick, Eric Bellman, and Robert Thomson. "Jakarta Warns of Euro Model," *the Asian Wall Street Journal*, 30 Mei 2012: 1.
- Bookbinder, Alex. "By-elections in Myanmar: Too early to lift sanctions," *The Jakarta Post*, 19 April 2012: 7.
- Caballero-Anthony, Mely. *Regional Security In Southeast Asia: Beyond the ASEAN Way*. Singapore: ISEAS, 2005.
- "Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015," ASEAN Secretariat 2012, <http://www.asean.org/resources/archives/item>, diakses pada 4 Januari 2013.
- Cox, Robert W., "Gramsci, Hegemony, and International Relations: An Essay In Method," *Millennium Journal of International Studies*, Vol. 12, No. 2, Summer 1983.
- Dewabrata, Wisnu. "Represi: Reformasi Myanmar, Akankah Berlanjut," *Kompas*, 28 Mei 2012: 10.
- _____. "Tiga Tahun yang Tersisa," *Kompas*, 2 Desember 2012: 10.
- Dewanto, Pamungkas Ayudhaning. "(Dis) Fungsi ASEAN," *Kompas*, 22 Maret 2011: 7.
- Drajat, Ben Perkasa. "An ASEAN way of protecting Indonesian migrant workers," *The Jakarta Post*, 3 Mei 2012: 7.

- Djalal, Hasjim. "ASEAN Connectivity," *Media Indonesia*, 18 April 2012: 20.
- Dosch, J. "ASEAN's reluctant liberal turn and the thorny road to democracy promotion," *The Pacific Review*, 2008.
- Fuller, Thomas. "West is pressed to lift Myanmar sanctions," *International Herald Tribune*, 4 April 2012.
- Gomez, Jim dan Sopheng Cheag. "ASEAN leaders call for lift of Myanmar sanctions," *The Jakarta Post*, 5 April 2012: 12.
- Haacke, Juergen. *ASEAN's diplomatic and security culture: Origins, development and prospects*. London and New York: Routledge-Curzon, 2003.
- _____. "ASEAN's diplomatic and security culture: a constructivist assessment," *International relations of the Asia-Pacific*, 3 (1), 2003: 57-87.
- Hund, Markus, "ASEAN Plus Three: Towards a New Age of Pan-Asian Regionalism? A Skeptic's Appraisal." *The Pacific Review*, Vol. 16, No. 3, 2003. September, 2003: 383-417.
- Idris, Faisal Nurdin. "ASEAN community: Moving beyond the rhetoric," *The Jakarta Post*, 10 Mei, 2011: 6.
- "Jakarta to develop 'ASEAN diplomatic zone'," *The Jakarta Post*, 29 Mei 2012.
- Jetschke, Anja. "Institutionalizing ASEAN: Celebrating Europe through Network Governance." *Cambridge Review of International Affairs*, Vol. 22, No 3, 2009: 407-426.
- Jetschke, Anja and Juergen Rueland, "Decoupling rhetoric and practice: the cultural limits of ASEAN cooperation," *The Pacific Review*, Vol. 22 No. 2: 179-203.
- Katsumata, Hiro "Mimetic Adoption and Norm Diffusion: ASEAN Security Community, Free Trade and Human Rights," *APSA 2009 Toronto Meeting Paper*.
- Kivimaki, Timo. "Power, interest or culture – is there a paradigm that explains ASEAN's political role best?" *The Pacific Review*, Vol. 21, 4, 2008.
- Kraft, Herman Joseph S. "The ASEAN Political-Security Community and Security Sector Governance in Southeast Asia," 2009, paper presented at Seminar on ASEAN After 40 Years at the University of Freiburg, Germany.
- Kuhonta, Eric Martinez, "Walking a tightrope: democracy versus sovereignty in ASEAN's illiberal peace," *The Pacific Review*, 2006.
- "Myanmar ethnic violence: Bangladesh urged to keep border open," *The Jakarta Post*, "14 Juni 2012: 10.

- Nainggolan, Poltak Partogi. "Menuju Pembentukan Parlemen ASEAN," *Analisis*, CSIS, Vol. 36, No. 4/Desember 2007: 440-453.
- _____. "Jalan Panjang Menuju Parlemen ASEAN," *Sinar Harapan*, 28 Agustus 2006.
- _____. "Parlemen ASEAN, Mungkinkah Terwujud," *Sinar Harapan*, 25 Agustus 2007.
- Nainggolan, Poltak Partogi *et al.* *ASEAN, AIPO, dan Kawasan yang Berubah*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR, 1997.
- _____. *Twenty Five Years ASEAN Inter-Parliamentary Organization (Volume I dan II)*, Jakarta: AIPO Sekretariat General, 2003.
- Nair, Deepak. "Do Stated Goals Matters? Regional Institutions in East Asia and the Dynamic of Unstated Goals," *RSIS Working Papers*, No. 199, 2010.
- Narine, Shaum. *Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia*, Boulder, Co, Lynne Rienner, 2008.
- "No entry," *International Herald Tribune*, 14 Juni 2012: 1.
- Pattiradjawane, Rene. "Ilusi ASEAN Perdamaian Korea," *Kompas*, 30 Mei 2012: 10.
- "Perdagangan Bebas Tekan Peluang Kerja," *Kompas*, 8 Pebruari 2012: 18.
- Prasetyantoko, A. "Mimpi Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Kompas*, 10 Mei 2011: 7.
- Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015: One Vision, One Identity, One Community*, Jakarta: ASEAN Sekretariat, 2010.
- Rother, Stepan. *Normen, Identitaeten und die Logik der Anarchie: Die ASEAN aus Konstruktivischer Perspektive*, Freiburg: Arnold Bergstraesser Institut, 2004.
- Rueland, Juergen. "ASEAN and the Asian Crisis: theoretical implications and practical consequences for SEA regionalism," *The Pacific Review*, Vol. 13, No. 3, 2000: 421-451.
- Rueland, Juergen and Anja Jetschke, "40 years of ASEAN: perspectives, performance and lessons for change," *The Pacific Review*, Vol. 21, No. 4, 2008: 397-409.
- Sajoo, Amyn B. "Pluralism in 'Old Society and New States': Emerging ASEAN Conflict," Singapore: ISEAS, 1999.
- Saragih, Bagus BT. "Groups concerned over ASEAN charter," *The Jakarta Post*, 11 Juni 2012: 4.

- Severino, Rodolfo C. *Southeast Asia In Search of An ASEAN Community*, Singapore: ISEAS, 2008.
- _____. *ASEAN*, Singapore: ISEAS, 2006.
- _____. *Southeast Asia In Search of An ASEAN Community*, Singapore: ISEAS, 2006.
- "Sengketa Preah Vihear PM Thailand Tolak Peran RI," *Media Indonesia*, 12 April 2011: 12.
- "Sistem Ekonomi Liberal Melanggar UUD 1945," *Media Indonesia*, 8 Juni 2011: 4.
- Storey, Ian ."ASEAN is a House Divided," *The Asian Wall Street Journal*, 15-17 Juni 2012: 11.
- "Students question ASEAN's benefits," *The Jakarta Post*, 8 Maret 2011: 12.
- Sukma, Rizal."ASEAN dan Sengketa Laut Cina Selatan," *Kompas*, 11 April 2012: 7.
- "Thailand Minta Bertemu: Kunjungan Marty Batal, Penandatanganan TOR Pasukan Pemantau terganjal," *Kompas*, 26 April 2011: 11.
- "Thailand Tolak Pertemuan dengan Kamboja di Indonesia," *Media Indonesia*, 21 Maret 2011: 12.
- Vatikiotis, Michael."Be realistic about change in Myanmar," *The Jakarta Post*, 15 Juni 2012: 7.
- Wibisono, Makarim."Komunitas ASEAN Terbentuk 2015?" *Kompas*, 4 April 2011.
- Yulisman, Linda."RI gains only slightly from free trade deals," *The Jakarta Post*, 19 Maret 2012: 6.
- _____. "ASEAN needs to liberalize 'realistically,'" *The Jakarta Post*, 3 April 2012: 1.